

**ANALISIS FAKTOR KESULITAN BELAJAR SISWA KELAS III DALAM
MEMAHAMI MATERI STRUKTUR PEMERINTAHAN PENDIDIKAN
PANCASILA DI SDN BANGKALAN**

Husnul Khotimah¹, Saosa Yumrotus Sholikhah², Qurrotu Inayati Maula³, Astien
Diena Koesmini⁴, Rukmiyati⁵

1220611100023@student.trunojoyo.ac.id

2220611100188@student.trunojoyo.ac.id

3gurratu.maula@trunojoyo.ac.id

4astienkoesmini86@guru.sd

ABSTRACT

This study aims to analyze the internal factors that cause learning difficulties among third-grade students in understanding the topic of governmental structure in the subject of Civic Education at SDN Bangkalan. The research employed a qualitative approach with a case study method. The participants were third-grade students, and data were collected through classroom observation and in-depth interviews. The findings indicate that students' learning difficulties are influenced by several internal factors, including: (1) limited cognitive development, as students are still at the concrete operational stage according to Piaget's theory, making it difficult to comprehend abstract concepts of state power division; (2) low interest and learning motivation due to the perception that the material is boring and irrelevant to daily life; and (3) negative perceptions toward Civic Education, which is often associated with memorizing institutional terms rather than connecting to real-life experiences. These results highlight that internal factors play a crucial role in shaping students' understanding of abstract material, thereby emphasizing the need for teaching strategies that align with the cognitive characteristics, interests, and perceptions of elementary school students.

Keywords: *learning difficulties, internal factors, cognitive development, learning motivation, Civic Education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas III dalam memahami materi struktur pemerintahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SDN Bangkalan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah siswa kelas III, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, antara lain: (1) keterbatasan perkembangan kognitif yang masih berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget, sehingga sulit memahami konsep abstrak pembagian kekuasaan

negara; (2) rendahnya minat dan motivasi belajar terhadap materi yang dianggap membosankan dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari; serta (3) persepsi negatif siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih menekankan hafalan istilah kelembagaan negara dibandingkan pengalaman nyata. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal memiliki kontribusi besar dalam memengaruhi pemahaman siswa terhadap materi abstrak, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik kognitif, minat, dan persepsi anak usia sekolah dasar.

Kata kunci: kesulitan belajar, faktor internal, perkembangan kognitif, motivasi belajar, Pendidikan Pancasila

A. Pendahuluan

Pendidikan karakter dan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sejak era reformasi, pendidikan kewarganegaraan semakin menekankan pada pembentukan identitas bangsa, penguatan nilai demokrasi, serta peningkatan kesadaran konstitusional warga negara. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai filosofis bangsa, tetapi juga mengenal struktur kelembagaan negara, seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemahaman tentang struktur pemerintahan menjadi fondasi penting bagi anak-anak untuk tumbuh sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan sadar politik sejak dini.

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi struktur pemerintahan, khususnya di sekolah dasar kelas rendah, masih menghadapi berbagai kesulitan. Banyak siswa yang mengalami hambatan dalam mengaitkan konsep abstrak pemerintahan dengan pengalaman nyata sehari-hari. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi, sikap pasif ketika pembelajaran berlangsung, serta keterbatasan mereka dalam mengingat dan menjelaskan kembali materi yang diajarkan. Dengan kata lain, kesulitan belajar siswa menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila pada jenjang kelas III.

Data empiris memperkuat fenomena tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila, Lestari, dan Hasanah (2022) menunjukkan bahwa

siswa kelas III sekolah dasar memperoleh skor motivasi belajar lebih rendah dibandingkan kelas I dan II, yakni hanya 71,72 dari 100 poin. Fakta ini mengindikasikan bahwa ketika memasuki kelas III, siswa menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memahami materi yang mulai bersifat abstrak, salah satunya struktur pemerintahan. Apabila kondisi kesulitan belajar ini tidak segera diidentifikasi dan diatasi, tujuan utama pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai media pembentukan karakter dan pemahaman demokrasi akan sulit tercapai.

Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila. Misalnya, Suherman, Khalid, dan Aminullah (2025) membuktikan bahwa metode kerja kelompok dapat meningkatkan motivasi siswa kelas V secara signifikan. Handayani, Mufarizuddin, Ananda, dan Aprinawati (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti video pembelajaran dan aplikasi Quizizz mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran Pancasila. Rifai, Novitasari, dan Stiyani (2022) melalui penerapan model *Problem*

Based Learning (PBL) juga menemukan bahwa pendekatan berbasis masalah efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Akan tetapi, mayoritas penelitian tersebut berfokus pada siswa kelas IV–VI, sedangkan kajian mendalam mengenai kesulitan belajar siswa kelas III dalam memahami materi struktur pemerintahan masih sangat terbatas.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada intervensi model atau media pembelajaran tertentu, belum banyak yang menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa secara komprehensif. Padahal, kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti minat, kemampuan kognitif, dan persepsi siswa terhadap manfaat materi, maupun faktor eksternal, seperti strategi guru, penggunaan media pembelajaran, serta dukungan lingkungan kelas. Celah inilah yang menjadi urgensi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini berfokus pada analisis faktor-faktor kesulitan belajar siswa kelas III dalam memahami materi struktur pemerintahan Pendidikan Pancasila di SDN Bangkalan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa saja hambatan utama yang dialami siswa, baik dari segi internal maupun eksternal, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak kelas rendah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas III dalam memahami materi struktur pemerintahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Studi kasus dipandang relevan karena penelitian difokuskan pada satu sistem yang terikat (*bounded system*), yaitu siswa kelas III di SDN Bangkalan, yang memiliki karakteristik spesifik, kompleks, dan terjadi dalam konteks pembelajaran yang nyata dan terintegrasi (Rosyada, 2020). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesulitan

belajar yang dialami siswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi internal siswa maupun dari eksternal seperti metode, media, dan strategi guru.

Penelitian dilaksanakan di SDN Bangkalan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil peninjauan awal ditemukan bahwa siswa kelas III mengalami kesulitan memahami materi struktur pemerintahan yang bersifat abstrak. Kesulitan tersebut terlihat dari rendahnya keterlibatan siswa dalam diskusi, ketidakmampuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi lembaga negara, serta kesulitan menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Selain itu, penggunaan media pembelajaran oleh guru masih terbatas pada metode ceramah dan buku teks, sehingga belum mampu membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Fenomena inilah yang menjadikan kondisi kelas III SDN Bangkalan layak dijadikan studi kasus penelitian.

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas III, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi aktual kelas. Guru kelas III dilibatkan sebagai

informan pendukung karena memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menentukan metode, media, serta strategi mengajar yang berpengaruh langsung terhadap pemahaman siswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesulitan siswa semata, tetapi juga menganalisis bagaimana peran guru dan keterbatasan media pembelajaran menjadi salah satu faktor eksternal yang turut memengaruhi munculnya kesulitan belajar.

Teknik pengambilan subjek menggunakan *purposive sampling*, yakni pemilihan secara sengaja dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik dengan fokus penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Siswa kelas III dipilih karena berada pada jenjang yang mulai mempelajari materi abstrak terkait struktur pemerintahan, sedangkan guru kelas dipilih karena dapat memberikan informasi mendalam mengenai strategi pembelajaran yang digunakan serta hambatan yang muncul selama kegiatan belajar.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi

dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, untuk menilai keaktifan siswa, partisipasi dalam diskusi, serta respon terhadap media dan metode pembelajaran yang digunakan (Sugiyono, 2018). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan siswa dan guru kelas III untuk menggali pengalaman, persepsi, serta faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, baik yang bersumber dari diri siswa (misalnya minat, kemampuan kognitif, dan rasa percaya diri) maupun dari faktor eksternal seperti metode ceramah yang monoton, keterbatasan media visual, kurangnya variasi strategi pembelajaran, serta lingkungan belajar yang kurang kondusif (Creswell & Poth, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas III di SDN Bangkalan mengalami berbagai kesulitan dalam memahami materi struktur pemerintahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kesulitan ini tampak pada rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana sebagian besar cenderung pasif, hanya

mendengarkan penjelasan guru tanpa menunjukkan respons berarti, seperti bertanya, mengemukakan pendapat, ataupun terlibat dalam diskusi kelas. Kondisi ini menggambarkan adanya hambatan yang cukup serius, karena tujuan utama pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah menumbuhkan sikap kritis, partisipatif, dan kesadaran demokratis sejak dini.

Dari hasil observasi, kesulitan siswa dalam memahami materi struktur pemerintahan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, kompleksitas materi yang masih terlalu abstrak bagi siswa kelas III. Materi mengenai pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sulit dipahami karena siswa berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami melalui benda nyata, pengalaman langsung, dan aktivitas konkret. Ketika pembelajaran hanya mengandalkan penjelasan verbal, siswa kesulitan menghubungkan konsep pemerintahan dengan realitas kehidupan sehari-hari (Piaget dalam Santrock, 2018).

Faktor kedua adalah metode pembelajaran guru yang masih didominasi ceramah. Observasi

menunjukkan bahwa guru lebih banyak menjelaskan materi secara lisan tanpa variasi metode lain, seperti diskusi kelompok, simulasi, atau permainan edukatif. Padahal, pembelajaran Pendidikan Pancasila seharusnya melibatkan siswa secara aktif agar nilai-nilai yang diajarkan dapat tertanam secara kontekstual. Ketika metode ceramah digunakan secara terus-menerus, siswa menjadi cepat jenuh, kurang tertarik, dan sulit memahami materi yang bersifat abstrak (Suryana & Fitriani, 2020).

Selain itu, faktor berikutnya adalah minimnya penggunaan media pembelajaran. Walaupun sekolah memiliki fasilitas seperti proyektor, guru jarang memanfaatkannya dalam mengajar. Tidak adanya penggunaan media visual seperti gambar, animasi, atau video menyebabkan pembelajaran terasa monoton. Padahal, menurut kerucut pengalaman Dale (1969), semakin banyak indera siswa terlibat dalam proses belajar, maka semakin tinggi pula pemahaman yang diperoleh. Ketiadaan media konkret dan visualisasi membuat siswa kesulitan memahami hubungan antara konsep pemerintahan dengan aktivitas nyata di lingkungannya.

Wawancara dengan siswa juga mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka menganggap materi Pancasila, khususnya struktur pemerintahan, membosankan. Hal ini disebabkan karena materi jarang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Siswa lebih sering diminta menghafal istilah-istilah kelembagaan negara tanpa diberi contoh konkret yang dekat dengan kehidupan mereka. Menurut Dewey (1938), pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu menghubungkan apa yang dipelajari dengan pengalaman hidupnya. Dengan demikian, tidak heran jika siswa merasa kesulitan dalam memahami struktur pemerintahan yang disampaikan secara abstrak dan monoton.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kesulitan belajar siswa kelas III pada materi struktur pemerintahan dalam Pendidikan Pancasila merupakan masalah yang kompleks. Siswa tidak hanya mengalami hambatan dalam memahami konsep abstrak pemerintahan, tetapi juga terkendala oleh strategi pembelajaran yang kurang mendukung.

Pertama, dari sisi materi, kesulitan siswa sejalan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Materi seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif memerlukan kemampuan berpikir abstrak yang belum sepenuhnya berkembang pada siswa kelas III. Oleh karena itu, tanpa dukungan media konkret dan pengalaman nyata, siswa cenderung mengalami kesulitan memahami materi.

Kedua, metode ceramah yang dominan justru memperkuat hambatan belajar. Guru lebih banyak berperan sebagai pemberi informasi dibandingkan fasilitator yang mendorong keterlibatan siswa. Penelitian Suryana dan Fitriani (2020) menunjukkan bahwa metode ceramah yang monoton dapat menyebabkan kebosanan, sedangkan penggunaan metode kolaboratif dan kontekstual mampu meningkatkan keterlibatan siswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa guru perlu lebih kreatif dalam menggunakan variasi metode yang sesuai dengan karakteristik anak kelas rendah.

Faktor lain yang turut memperparah kesulitan belajar adalah

minimnya pemanfaatan media pembelajaran. Menurut kerucut pengalaman Dale (1969), pembelajaran akan lebih efektif jika siswa dilibatkan melalui berbagai indera. Namun dalam praktiknya, guru jarang menggunakan media visual seperti gambar, video, atau simulasi. Hal ini kontras dengan penelitian Handayani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan media digital interaktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Selain itu, wawancara dengan siswa mengungkap bahwa mereka merasa materi struktur pemerintahan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pandangan Dewey (1938) yang menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual agar siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari bermakna. Penelitian Lina dkk (2022) juga mendukung hal ini dengan temuan bahwa siswa sekolah dasar lebih mudah memahami PPKn ketika materi dikaitkan langsung dengan pengalaman di sekolah maupun keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesulitan belajar siswa kelas III dalam

memahami materi struktur pemerintahan dipengaruhi oleh kombinasi faktor: tingkat perkembangan kognitif yang masih konkret, metode ceramah yang monoton, minimnya pemanfaatan media, serta kurangnya kontekstualisasi materi dengan kehidupan nyata siswa. Solusi untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan penerapan strategi pembelajaran inovatif yang lebih kolaboratif, menggunakan media visual dan digital, serta mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari anak.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa kelas III di SDN Bangkalan masih mengalami kesulitan belajar yang cukup signifikan dalam memahami materi struktur pemerintahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kesulitan tersebut tampak dari rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sikap pasif selama diskusi, serta keterbatasan mereka dalam menjelaskan kembali konsep lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa lebih dari separuh siswa belum mampu

menguasai indikator pembelajaran yang ditetapkan.

Kesulitan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kompleksitas materi yang bersifat abstrak, seperti pembagian kekuasaan negara, yang sulit dipahami oleh siswa kelas III karena mereka masih berada pada tahap operasional konkret menurut teori perkembangan kognitif Piaget.
2. Metode pembelajaran guru yang monoton, didominasi oleh ceramah, sehingga membuat suasana kelas pasif, jenuh, dan kurang memberi ruang bagi partisipasi aktif siswa.
3. Minimnya pemanfaatan media pembelajaran, baik berupa gambar, video, maupun simulasi yang dapat membantu visualisasi konsep abstrak.
4. Kurangnya kontekstualisasi materi, di mana pembelajaran jarang dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga mereka merasa materi tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa kesulitan belajar

siswa kelas III bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan internal, tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh aspek pedagogis, khususnya strategi guru dan pemanfaatan media pembelajaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesulitan belajar siswa kelas III dalam memahami materi struktur pemerintahan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi guru, disarankan untuk mengembangkan variasi metode pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Metode seperti diskusi kelompok, simulasi peran, permainan edukatif, maupun *Problem-Based Learning* (PBL) dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep abstrak. Guru juga perlu memanfaatkan media pembelajaran digital, seperti video, animasi, dan aplikasi kuis interaktif, agar suasana belajar lebih menarik dan sesuai dengan

- karakteristik siswa kelas rendah.
2. Bagi sekolah, penting memberikan dukungan penuh kepada guru dengan menyediakan fasilitas teknologi yang memadai serta pelatihan terkait pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Dukungan kelembagaan ini dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, terutama pada materi yang menuntut pemahaman abstrak seperti struktur pemerintahan.
 3. Bagi pengembang kurikulum, perlu dilakukan penyusunan materi struktur pemerintahan yang lebih sederhana, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan agar materi lebih sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar yang masih berada pada fase operasional konkret.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan model pembelajaran inovatif, seperti Project-Based Learning, PBL, maupun pemanfaatan media

digital interaktif, dalam meningkatkan motivasi serta hasil belajar Pendidikan Pancasila. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus dengan membandingkan kesulitan belajar di jenjang kelas rendah lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, R. N., Masfuah, S., & Rondli, W. S. (2022). Analisis faktor penyebab kesulitan belajar PPKn di SD. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(1), 671-685.
- Cemerlang, S. H., Mufarizuddin, M., Ananda, R., Aprinawati, I., & Pebriana, P. H. (2024). Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas IV Menggunakan Video Pembelajaran dan Aplikasi Quizizz pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 429-436.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. Retrieved from <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Lina, W. P., & Sarifah, I. Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Kelas Rendah Pada Muatan

- Pembelajaran Ppkn di Masa Pandemi Covid-19. *Pedagogia*, 19(2), 139-149.
- Rifai, A. M. N., Novitasari, M., & Stiyani, D. F. M. (2024). Penerapan Model PBL untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Kelas VI SD. *Jurnal Ika Pgsd (Ikatan Alumni Pgsd) Unars*, 15(1), 95-105.
- Suherman, A., Khalid, M. I., & Aminullah, A. (2025). Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Kerja Kelompok pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SDN 33 Cece. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 8(2), 513-524.